

Perkembangan Geopolitik Indo-Pasifik: Implikasinya pada Pengelolaan Kekuatan Udara dan Antariksa

Dinna Prapto Raharja, Ph.D

Lektor Kepala bidang Hubungan Internasional, Universitas Bina Nusantara
Pendiri Synergy Policies (lembaga konsultan interdisipliner untuk kebijakan publik)
dinna.prapto.raharja@gmail.com, dinna@binus.ac.id

Abstrak — Siap menghadapi ancaman pelanggaran kedaulatan, radikalisme, terorisme, dan bencana alam adalah pesan Presiden Joko Widodo kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam upacara peringatan hari ulang tahun TNI ke-76 pada tahun 2021. Apa saja perkembangan geopolitik terkini yang patut dicermati oleh TNI, khususnya Angkatan Udara?. Artikel ini mengungkap perkembangan geopolitik yang terpadu dengan geoekonomi dan geostrategis di kawasan. Menelusuri publikasi dari sejumlah lembaga-lembaga penelitian, lembaga pemerintah, dan jurnal-jurnal internasional yang membahas tentang geopolitik, kekuatan udara and antariksa, industri pertahanan dan diplomasi kekuatan udara dan antariksa, ditemukan bahwa ambisi saling menyerang dan perlombaan senjata makin memprihatinkan di kawasan Indo-Pasifik. Perlombaan senjata yang terjadi dan ambisi untuk saling menyerang antara AS, China dan Rusia belum secara efektif dikendalikan lewat mekanisme diplomasi ASEAN. Rencana Strategis Kementerian Pertahanan dan kegiatan diplomasi perlu disesuaikan agar tidak kalah jitu dan cepat dalam merespon perkembangan ketegangan di kawasan.

Kata kunci: geopolitik, kekuatan udara (*air power*), antariksa (*space*), diplomasi, Indo-Pasifik.

Pendahuluan

Politik antar negara terus berkembang bahkan tidak mustahil berubah seiring dengan aksi reaksi yang terjadi antar negara. Bukan hanya aksi-reaksi antar negara yang berhadapan langsung yang dapat memengaruhi politik antar negara tetapi juga aksi-reaksi yang muncul sebagai imbas dari perkembangan konteks. Dalam artikel kali ini, akan disoroti bagaimana faktor geografis menjadi bagian yang penting dalam pembentukan relasi sosial politik antar negara. Cara pandang ini dikenal dengan pendekatan geopolitik.

Telah sering kita dengar bahwa Indonesia punya peran strategis di kawasan. Hal ini terutama disebabkan karena sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia berada di jalur perlintasan dunia yang diapit oleh dua samudera: Samudra Pasifik dan Samudra

Hindia, dan oleh dua benua: Asia dan Australia. Peran strategis ini bisa berubah sesuai situasi yang berkembang dan bagaimana Indonesia membawakan dirinya dalam kancah pergaulan antar negara. Untuk itu kita patut bertanya: apa saja perkembangan geopolitik terkini yang patut dicermati oleh TNI, khususnya Angkatan Udara?

Pendekatan geopolitik telah bertransformasi beberapa kali, dari yang disebut *classical geopolitics* dimana politik itu dianggap sebagai praktek penguatan *power* atas territorial menuju *critical geopolitics* (Kuus, 2010). Dalam pendekatan terkini, yakni *critical geopolitics*, konsep kekuatan negara tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang statis melainkan sebagai sesuatu yang dibentuk oleh rangkaian diskursus dari para

tokoh-tokoh sosial politik termasuk kaum intelektual. Perbincangan soal geopolitik tidak lagi dipandang sebagai upaya negara-negara kuat untuk melakukan pemaksaan (*coercion*) dan menguasai wilayah negara-negara lain yang relatif lebih lemah tetapi sebagai cara membangun pandangan bersama yang bahkan bisa menguatkan (*enabling*) negara-negara lain untuk berpartisipasi dalam diskursus yang ada. Pendekatan *critical geopolitics* menyoroti interaksi antar manusia dalam ruang spasial geografi tertentu: sumber perdebatan, pencarian, dan interaksi antar aktor. Pendekatan ini tidak lagi terbatas oleh konsep-konsep regionalisme lama seperti ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) sehingga negara-negara bisa saja berpikir dan bertindak dengan pola lain yang berkembang di luar konsep regionalisme yang sebelumnya ada. Negara-negara belum tentu sungkan dan tunduk pada kesepakatan yang diambilnya di ASEAN, tetapi justru mencermati bagaimana dinamika konsep kewilayahan antar negara yang berkembang dari waktu ke waktu.

Dalam pendekatan *critical geopolitics*, negara dan kepentingannya tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang statis. Negara dipandang sebagai suatu komunitas penduduk yang membentuk bangsa dan terus mengembangkan identitas tertentu: melakukan pembedaan antara dirinya dengan bangsa lain (Dijkink 1996). *Critical geopolitics* memberi makna pada peta dan tidak lagi sekadar melihat pada lokasi geografis negara-negara dunia (Tuathail 1998).

Realita terkini bahkan mengharuskan kita memandang geopolitik sebagai satu kesatuan dengan geostrategi (dimensi militer dan keamanan yang turut dibentuk oleh posisi geografis) dan geoekonomi (dimensi pengelolaan sumberdaya dan ekonomi yang turut dibentuk oleh posisi geografis). Artinya aksi reaksi antar negara tidak bisa dipisahkan hanya untuk bicara dimensi militer dan keamanan saja, atau ekonomi saja, tetapi harus dilihat secara lebih utuh mencakup dimensi sosial politik, militer dan keamanan, dan pengelolaan ekonomi.

Berikut sejumlah fakta khas tentang posisi geografis Indonesia sebagai konteks. Indonesia memiliki wilayah perairan luas yang dilalui oleh sejumlah rute utama maritime dunia (*sea lanes of communication*) dimana aneka kapal untuk logistik, perdagangan, maupun Angkatan bersenjata punya hak untuk melintas damai. Di atas perairan tersebut, ruang udara yang terbentang bersifat strategis juga karena merupakan salah satu perlintasan udara yang terpadat di dunia setelah ruang udara Amerika Serikat (Tentua 2020). Pergerakan kapal udara untuk urusan komersil maupun militer diatur sesuai perundang-undangan yang berlaku tetapi sebatas ketinggian 20.000 kaki saja (disebut *Flight Information Region - FIR*) atau di atas 20.000 kaki (disebut *Upper Flight Information Region - UIR*). Sampai awal tahun 2022, ketentuan internasional tentang ruang kedaulatan udara yang bersumber pada kepemilikan dan hak mengelola ruang udara masih terbatas sampai ketinggian 20.000 kaki, yakni sesuai 1944 *Chicago Convention*. Untuk antariksa, ada kesepakatan internasional *The Outer Space Treaty* yang memberi mandat kepada tiap negara untuk mengatur sendiri kegiatan di antariksa. Ada pula *United Nations Office of Outer Space Affairs (UNOOSA)* untuk mendukung negara-negara dalam menyusun kerangka hukum, teknis dan infrastruktur politik dalam berkegiatan di antariksa. Kegiatan di antariksa perlu diatur karena sudah ada preseden dimana negara-negara tertentu mengembangkan kegiatan komersil dan komando pertahanan keamanan mereka dari antariksa yang berpotensi merugikan negara-negara lain, sementara aktor-aktor non-negara dari negara-negara maju terus tumbuh sehingga ruang antariksa semakin padat dan kompetitif (Goguichvili, Linenberger & Gillette 2021). Tidak kurang dari 70 negara telah mengoperasikan satelitnya (World Economic Forum 2016).

Artikel ini tidak akan membahas soal teknis regulasi ruang udara ataupun antariksa. Perhatianakanterarahjustrukepadapemetaan kegiatan dan cara pandang terhadap negara-

negara lain yang kini sedang terbentuk akibat aksi-reaksi antar negara dan komunitas bangsa. Dengan mengarahkan perhatian pada pemetaan tersebut, kecenderungan perilaku dan aksi-reaksi sejumlah negara akan membantu kita mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperkuat oleh Indonesia. Secara khusus

Bahan dan Metode

Artikel ini disusun menggunakan metode penelitian kualitatif berupa kajian literatur. Peneliti menelusuri hasil penelitian dari lembaga-lembaga kajian ternama di Amerika Serikat (AS), Australia, Uni Eropa, dan di negara-negara ASEAN (RAND.org di Amerika Serikat, Mitchell Institute for Aerospace Studies di Amerika Serikat, Air Power Australia, RSIS Singapura, Asia Center at the European Union, Yusof Ishak Institute, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia - LIPI, Institute for National Strategic Studies - INSS), lembaga pemerintah (Allied Air Command dari NATO, Air and Space Power Centre Australia, US Department of Defense, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia) dan jurnal-jurnal internasional yang membahas tentang industri pertahanan dan diplomasi ruang udara dan antariksa. Seluruh artikel yang terdeteksi dibaca secara seksama dan dikenali pandangannya terkait tema-tema berikut ini:

Hasil

1. Masa Depan Perang

Temuan utama di sini adalah bahwa negara-negara dunia menunjukkan kecenderungan untuk bersikap waspada tentang dampak dari pandemi kepada kemampuan militer dirinya maupun lawannya. Pandemi ternyata tidak menggerus kemampuan finansial negara untuk memodernisasi ataupun memperkuat Angkatan Bersenjata. AS di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden justru mendapatkan peningkatan anggaran

artikel ini berusaha mengenali perubahan situasi akibat pandemi COVID-19. Perhatian pada pandemi diperlukan karena tidak mustahil krisis kesehatan yang ditimbulkan oleh pandemi berpotensi mengubah aksi-reaksi antar negara.

masa depan perang, wilayah kompetisi ruang udara dan antariksa, dan peran diplomasi dalam ruang udara dan antariksa. Secara khusus diberikan perhatian pula pada kata-kata kunci ruang udara dan antariksa menurut pandangan China, Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia dan Indonesia. Artikel yang dirujuk argumennya dikutip sesuai ketentuan menuliskan kutipan ilmiah.

Dengan segala keterbatasan waktu yang diberikan untuk menyiapkan materi dan menuliskannya, yakni satu minggu, maka penarikan tema-tema belum bisa dilakukan sesuai standar sistematisasi penelusuran data yang ada. Peneliti menghindari bias dalam pemetaan hasil dengan melakukan triangulasi informasi dari lembaga-lembaga kajian negara lain atau melacak pernyataan resmi pemerintah negara-negara lain.

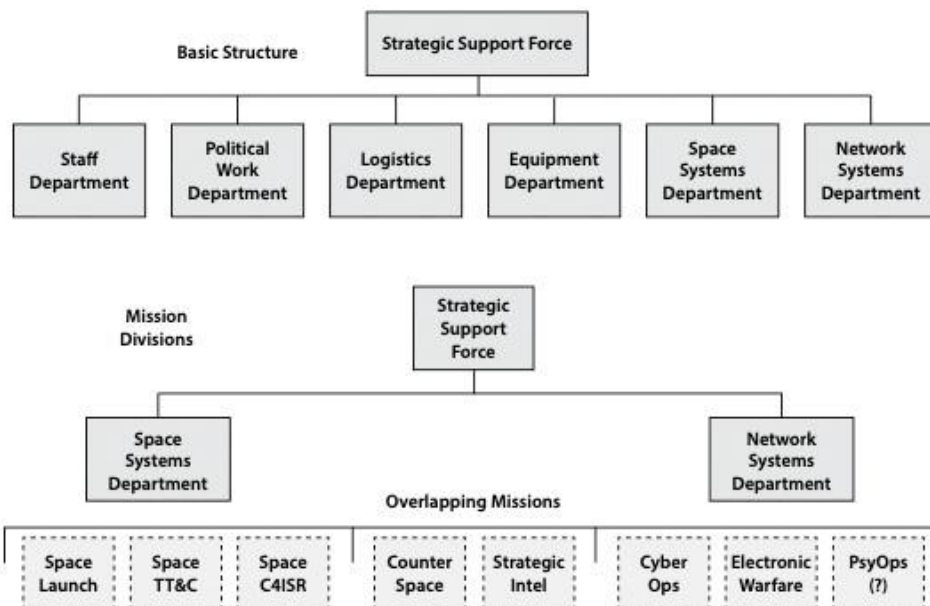
pertahanan terbesar dalam sejarah, bahkan lebih besar dari jaman perang Vietnam,

perang Korea, dan masa Presiden Ronald Reagan (Vox.com 22/12/21). Hal yang sama dapat disaksikan pula di China (Tiongkok) dan Rusia dimana tekad memperluas wilayah pengaruh dan kekuasaan ekonomi, militer dan keamanannya justru menguat saat pandemi. Kedua negara ini bahkan melancarkan ancaman demi ancaman, baik secara persenjataan maupun retorika, demi mendapatkan respon AS.

AS memantau cermat perkembangan

China. Costello & McReynolds (2018) mengidentifikasi struktur dan mekanisme kerja *Strategic Support Force* (SSF) yang dibentuk oleh *People's Liberation Army* (PLA) pada akhir tahun 2015. SSF menjadi pusat kemampuan perang di ruang udara, siber, elektronik dan psikologisnya dimana kemampuan-kemampuan yang biasanya terpisah-pisah pengolaannya di sejumlah departemen disinergikan agar China lebih decisive, lebih jitu mengambil keputusan bila terjadi perang. SSF melaporkan kegiatannya kepada Komisi Militer Pusat (*Central Military*

Commission) yang memantau dua badan semi-independen berikut: *Space System Department* (memimpin operasi ruang udara) dan *Network Systems Department* (memimpin kekuatan siber). Fungsi SSF adalah menjadi penyedia informasi strategis dan pendukung operasi strategis. Intinya, SSF ini akan mengkoordinasikan rangkaian tindakan untuk melumpuhkan sistem kendali perang lawan. SSF kabarnya menyontoh model *US Strategic Command* (USSTRATCOM). Lihat gambar 1 untuk struktur SSF



Key: PsyOps: psychological operations; TT&C: telemetry, tracking, and control.

Sumber: Costello & McReynolds (2018, p. 11)

Kementerian Pertahanan Amerika Serikat mengeluarkan laporan 2020 untuk Kongres (Department of Defense 2020) yang mengungkapkan bahwa PLA berkeinginan menjadi *world class military* selambat-lambatnya pada akhir tahun 2049 dimana disebutkan bahwa AS menduga arahnya adalah mengejar kehebatan militer AS atau negara-negara besar lain yang dianggap mengancam China. Bekal China adalah pembangunan ekonomi demi menggenjot anggaran pertahanan yang lebih besar. Di situ dikemukakan bahwa China kini telah memiliki:

- Angkatan Laut terbesar di dunia (daya perang sekitar 350 kapal dan kapal selam) mengalahkan Angkatan Laut AS (daya perang 293 kapal dan kapal selam),
- lebih dari 1.250 *ground-launched ballistic missiles* dan *ground-launched cruise missiles* dengan daya jangkau antara 500 - 5.500 km sementara AS *ground-launched ballistic missile*-nya memiliki daya jangkau antara 700 - 300 km dan belum memiliki *ground-launched cruise missiles*.
- Sistem kekuatan udara yang terintegrasi, dengan Angkatan Udara terbesar dan terkuat di dunia yang menguasai *advanced*

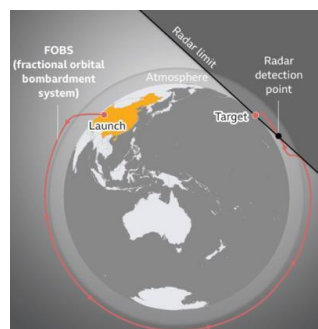
long-range surface-to-air systems termasuk teknologi Rusia S-400s, S-300s dan sistem yang dibuatnya sendiri di dalam negeri.

- China memperluas basis logistik dan infrastrukturnya untuk menjaga kekuatan militernya di luar wilayah China dimana Indonesia termasuk salah satu negara yang disebut sebagai potensi sasaran.
- China bertekad menjadi yang terdepan di bidang *artificial intelligence, autonomous systems, advanced computing, quantum information sciences, biotechnology, advanced materials dan manufacturing*.

Dari segi teknologi, persenjataan China dan Rusia sulit dilacak menggunakan teknologi

radar yang ada. China dikabarkan sudah siap dengan teknologi *hypersonic glide missile*. Pada bulan Juli 2021, uji coba misil ini telah dilakukan dengan kecepatan lima kali kecepatan suara, dan lagi dilakukan di November 2021 di Laut China Selatan. Rusia juga mengembangkan teknologi serupa dan di bulan Februari 2022 tampak ada *hypersonic land-attack missile* di Kaliningrad. Teknologi ini dikabarkan lebih sulit dideteksi radardaripada *ballistic missile* karena teknologi ini mengorbit di level rendah sebelum dipacu lebih tinggi menuju sasaran, atau disebut sebagai *fractional orbital bombardment system*. Ketika radar mendeteksi, posisi misil bisa terlalu dekat pada sasaran. Lihat gambar 2.

Gambar 2. *Fractional Orbital Bombardment System*



Sumber: BBC.com, 30 Dec 2021

World Economic Forum (2016) membahas bahwa perkembangan perlombaan persenjataan memang mengerikan: senjata tanpa awak pun bisa dibuat sangat mematikan dan merusak, apalagi jika media sosial diradikalisasi sehingga publik sulit melihat apa yang sesungguhnya sedang terjadi dan suara-suara kebencian bisa terdengar lebih keras dari yang sesungguhnya (*echo-chamber effect*). World Economic Forum mengajak kita merefleksikan keterbatasan manusia, esensi martabat manusia, bagaimana manusia berelasi dengan kekerasan. Perlombaan senjata era ini diprediksikan lebih sulit dikendalikan apalagi teknologi berkembang pesat. Teknologi yang mematikan bisa makin murah dan mudah diperoleh di masa depan. Meskipun dibicarakan perlunya dibentuk mekanisme soft governance di tatanan diplomasi multilateral

demasi mengatur standar laboratorium, testing, asuransi dan penelitian, World Economic Forum mencatat adanya keterbatasan pada kemampuan pemantauan negara.

ESPAS (2018) mencatat perlunya mengantisipasi bahwa negara yang lemah (militernya) akan terdesak oleh lingkaran pengaruh negara-negara yang lebih kuat sehingga proxy war bisa lebih sering terjadi dengan sasaran kota-kota megapolitan. Dalam situasi demikian maka kekuatan udara akan tidak efektif, kecuali persenjataan bersifat non-lethal dan berteknologi tinggi sehingga ketepatan sasaran lebih tinggi. Angkatan Bersenjata digambarkan akan lebih berbasis network, mengejar sasaran-sasaran yang terpersonalisasi (facial recognition, biometric and biochemical sensing system, dan sebagainya).

2. Wilayah Kompetisi Ruang Udara dan Antariksa

Berdasarkan perkembangan potensi perang, negara-negara yang berkepentingan untuk bertarung dalam perlombaan senjata atau menjaga wilayah teritorialnya sedang saling memantau. Masing-masing juga mengembangkan konsep pertahanan baru untuk ruang udara dan antariksa. Konsep-konsep ini diperkuat secara kelembagaan dengan penyelarasan proses pengambilan keputusan yang tidak lagi terfragmentasi oleh departemen, bahkan melibatkan warga sipil di pucuk-pucuk pimpinannya (misalnya di Amerika dan China).

Untuk pertahanan antariksa, AS sudah punya the *United States Space Force* (USSF) yang menjadi bagian dari Departemen Angkatan Udara sementara China memantau ketat AS dengan pembentukan *Strategic Support Force* (SSF). Kelembagaan dan proses pengambilan keputusan di keduanya dikembangkan sedemikian rupa agar tepat guna dan cepat.

Sebagai negara demokrasi, AS sadar bahwa ada langkah ekstra yang perlu diambilnya untuk bisa menyaingi kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan China. AS melalui RAND Project Air Force menyiapkan *earlywarningsystem* yang akan mengingatkan para pengambil kebijakan ketika salah satu divisi di Angkatan Udara AS mengalami resiko kekurangan sumberdaya sehingga ada cukup waktu untuk mempertimbangkan ragam opsi demi mencapai kesepakatan soal solusi. Dari penyiapannya nampak bahwa masih dibutuhkan teknologi penguat penginputan data yang cepat, akurat dan berfungsi baik (Schulker et.al. 2021).

Australia, salah satu sekutu AS, yang posisi geografisnya tak jauh dari Indonesia menyikapi perkembangan ini dengan mendorong diversifikasi kekuatan militernya. Dalam studi yang dikutip oleh Air and Space Power Centre, Angkatan Udara Australia diharapkan bergerak ke mode "*competing constantly*" dengan melakukan strategi operasi multi-ranah (*multi-domain operation*)

termasuk melalui perang informasi, bahkan disrupsi pola berpikir, agar pengambilan keputusan pemerintahan mengecilkan tindakan apapun yang dilakukan musuh dan mendukung agenda yang didorong oleh Angkatan Udara (Hunter 2020).

Westwood (2020) membahas pengembangan konsep *Combat Cloud* oleh Australia dimana penerbang generasi kelima bersinergi dengan kekuatan antariksa menggunakan teknologi komputer dan informasi sehingga pertukaran informasi lintas *platform, domain, services* bahkan mitra koalisi berjalan mulus. Di sini Australia bicara tentang aliansinya dengan AS dalam konteks Indo-Pasifik dimana sejarah perang Inggris dibahas. Hal ini menjadi relevan dengan pembentukan aliansi Australia, AS dan Inggris (AUKUS) di bulan September 2021. Untuk antariksa, Australia mendirikan *Space Command* pada bulan Januari 2022 yang dalam wacananya diharapkan bisa menjadi *copy-paste* USSF. Artinya Australia, AS dan Inggris paham akan pentingnya *interoperability* dalam kerjasama militer mereka sehingga pembahasan isu ini diangkat di tahap awal pembentukan AUKUS. Laporan Larson et.al. (2004) pada RAND mengkonfirmasi tentang betapa berbahayanya ketika kekuatan udara negara-negara sekutu mengalami masalah *interoperability*, baik di level strategis, operasional, taktik maupun teknologi: efeknya adalah pemburukan perbedaan posisi politik yang berpotensi meningkatkan korban jiwa.

Di sisi lain, China berlomba juga mengembangkan *anti-stealth radar, anti-drone radar* dan kabarnya teknologi mereka lebih superior dibandingkan yang dimiliki negara-negara Barat. Radar yang dimiliki China kabarnya bisa dipakai untuk sejumlah fungsi, bukan hanya untuk target stealth tetapi juga untuk mendeteksi artileri dan sistem *early warning* lainnya (Global Times, 24/4/21). China bekerjasama dengan Pakistan, misalnya, dan menempatkan *anti-stealth radar* di basis udara, membangun Angkatan Laut Pakistan,

dan membagikan persenjataan dan kapal-kapalnya untuk Bangladesh dan Sri Lanka (South China Morning Post, 23/11/19). China

berusaha memperkecil ruang gerak musuh lamanya, India, melalui kerja sama tersebut.

3. Peran Diplomasi Ruang Udara dan Antariksa

Diplomasi adalah perpanjangan tangan politik dalam negeri melalui pengelolaan kegiatan antar negara secara damai. Sebagian negara menggunakan diplomasi untuk menciptakan narasi tentang dunia, tentang negara musuh, atau tentang dirinya sendiri. Sebagian lagi mengucurkan dana kepada negara-negara lain manakala dibutuhkan, mengunjungi pimpinan negara tertentu demi mendapatkan dukungan negara tersebut, atau menyelenggarakan acara bersama dan kegiatan internasional yang mendukung agenda-agenda sosial politik, ekonomi, militer dan keamanan yang didorongnya.

Dalam kegiatan diplomasi, selama sepuluh tahun terakhir menguat kesadaran akan bahwa AS, China dan Rusia perlu dibendung

nalurinya untuk saling bersaing dan menyerang. Tumpuan diplomasi terkini di kawasan adalah konsep geopolitik, geoekonomi dan geostrategi Indo-Pasifik. Wilayah Indo-Pasifik adalah terdiri dari negara-negaran perairannya (serta daratan antariksa) di sekitar Samudra Hindia, Samudra Pasifik bagian Barat dan Tengah, serta Indonesia sebagai penghubung kedua daerah tersebut. Dalam khazanah studi geografi, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, istilah Indo-Pasifik sudah lama dikenal; merujuk ke kawasan dunia yang terbesar dan terdiri dari paling banyak pulau-pulau tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati. Namun dalam khazanah studi politik keamanan, Indo-Pasifik menggusur penggunaan konsep Asia-Pasifik dan Asia Tenggara.

Gambar 3. Kawasan Indo-Pasifik



Sumber: The Asia Today.org

Ketika Jepang menyodorkan konsep diplomasi Indo-Pasifik, rujukannya adalah the *rise of China*. Jepang menyampaikan idenya untuk menjadikan kawasan Indo-Pasifik sebagai *international public goods* yang membawa stabilitas dan kesejahteraan buat negara

manapun (Ministry of Foreign Affairs Japan 2018, 2019). Cara Jepang mengagendakan kepentingannya tersebut di tingkat global adalah dengan menawarkan mekanisme QUAD (*Quadrilateral Security Dialogue*) pada tahun 2007 yakni dialog bertema keamanan

yang ditopang oleh kerja sama antara AS, India, Jepang dan Australia. Di luar lingkaran militer, konsep diplomasi yang kemudian ditawarkan Jepang pada tahun 2016 adalah *Free and Open Indo-Pacific* dalam berbagai bentuk kerja sama ekonomi dan keamanan.

Ide Jepang sebenarnya dengan cepat direspon oleh Indonesia di tahun 2013. Indonesia menginginkan dialog terbuka antar negara yang khawatir akan potensi ancaman di kawasan melalui mekanisme ASEAN yakni East Asia Summit. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri

Marty Natalegawa mengajukan gagasan pembentukan *Indo-Pacific Treaty of Friendship and Cooperation*. Agenda ini diolah terus oleh Indonesia karena meskipun pembentukan *Indo-Pacific Treaty* tidak terjadi, lahir dokumen ASEAN *Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) di bulan Juni 2019. Kesulitan Indonesia (dan ASEAN) adalah karena ada kesenjangan pandangan antara negara-negara QUAD dan ASEAN tentang cara menghadapi China. ASEAN menawarkan dialog demi mengikis rasa tidak percaya, miskalkulasikan pola tindakan *zero-sum game* sementara keresahan negara-negara QUAD pada China sudah (telanjur) relatif tinggi. Negara-negara anggota ASEAN bukan termasuk yang secara langsung terancam oleh China sementara hal yang berbeda dirasakan oleh negara-negara QUAD. Akibatnya Indonesia yang mendorong AOIP malah dipandang lebih termotivasi untuk semata menciptakan kredibilitas simbolik atas visi Presiden Joko Widodo seputar Poros Maritim Dunia dan menguatkan profil Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (Weatherbee, 2019).

Sesungguhnya Amerika Serikat memang punya interpretasi yang lebih tajam soal Indo-Pasifik di bidang militer dan keamanan. Dalam *Indo-Pacific Strategy Report* (2019), Kementerian Pertahanan AS menyoroti situasi keamanan yang semakin kompleks dimana telah terjadi "geopolitical rivalry" antarnegara-negara bebas (free) dan negara yang represif. Narasi pertarungan ideologi ini diangkat

sebagai keprihatinan utama AS. Dalam strategi tersebut China disebut sedang mengatur ulang tatanan kawasan agar menguntungkan China semata, meningkatkan modernisasi militer, memperluas ruang pengaruhnya, dan memaksa negara-negara lain seperti layaknya predator melalui kerja sama ekonomi yang ditawarkan China. Untuk itu ada tiga prinsip yang disodorkan AS:

- (1) kesiapan (*preparedness*) sekutu dan mitra agar punya kekuatan yang *combatcredible* yang menjamin *lethality against high-end adversaries*,
- (2) kemitraan (*partnerships*) melalui jejaring sekutu dan mitra yang bisa menggentarkan, punya kapasitas perang yang *interoperable*, saling menghargai kedaulatan, saling menguntungkan di bidang perdagangan dan *rule of law*,
- (3) mendorong kawasan yang saling berjejaring (*a networked region*) dimana keterhubungan ini diarahkan untuk menggentarkan agresi, menjaga stabilitas kawasan sambil menjaga akses perlintasan bebas.

Pada masa Presiden Trump, agenda Indo-Pasifik ini dibentuk ulang oleh AS sebagai cara baru mengisolasi China. AOIP belum mampu merespon keresahan AS ini. Tak heran pada 15 September 2021, AS mendeklarasikan AUKUS yakni aliansi tiga negara AS, Australia dan Inggris di bidang keamanan (White House 2021).

Di ASEAN, China dan AS didekati terus melalui mekanisme KTT (*Summit*) dan dialog badan-badan ASEAN lainnya. China didorong untuk terus mengulangi komitmen tertulisnya setiap tahun tentang penghormatan pada *ASEAN Treaty of Amity and Cooperation* dan pada kerja sama yang dibahas dalam mekanisme-mekanisme yang dipimpin oleh ASEAN, termasuk AOIP (ASEAN 2021 a). Sementara itu AS diberi pujian tertulis dalam *Chairman Statement ASEAN* karena mendukung dan berpartisipasi dalam *East Asia Summit*, *ASEAN Regional Forum*, *ASEAN*

Defence Ministers' Meeting Plus dan Expanded ASEAN Maritime Forum (ASEAN b). Hal yang sama dilakukan ASEAN pula untuk Rusia (ASEAN 2021 c). Hanya saja hubungan ASEAN-Rusia belum se-intensif dengan ASEAN-China ataupun ASEAN-AS. Rusia termasuk yang perilaku diplomatiknya sulit ditebak. Menurut sejumlah pengamat, Rusia pada dasarnya oportunis; dimana ada kesempatan maka Rusia akan memanfaatkannya bila memang dibutuhkan terutama untuk berhadapan dengan AS (Grissom et.al. 2022). Rusia lebih tidak malu-malu menantang AS. Presiden Putin di bulan April 2021 mengatakan bahwa kalau AS berani mengancam keamanan Rusia maka "*Russia's response will be asymmetrical, fast, and tough*" (New York Times 16/1/22).

Negara-negara Uni Eropa juga tak tinggal diam namun fokus mereka lebih pada penguatan multilateralisme agar makin banyak negara-negara yang terlibat dalam mengisi konsep kerja sama di Indo-Pasifik (Raharja 2020). Pada bulan September 2020, Pemerintah Federal Jerman mengumumkan *Policy guidelines for the Indo-Pacific* dengan mengatakan bahwa masa depan abad 21 akan ditentukan di Indo-Pasifik. Perancis menyusul dengan panduan serupa, mengatakan bahwa Indo-Pasifik adalah "*a priority for France*". Belanda di bulan November 2020 menyusul juga dengan mendesak Uni Eropa agar meredakan ketegangan di Laut China Selatan demi

Pembahasan

Temuan pola-pola perang, wilayah kompetisi ruang udara dan antariksa serta diplomasi di atas menggambarkan bahwa negara-negara lain di sekitar Indonesia sedang terus memperkuat diri dan melontarkan ancaman pada negara-negara lain yang dianggap sebagai musuh. AS berhadapan dengan China di wilayah Indo-Pasifik. AS berhadapan pula dengan Rusia. China dan Rusia memiliki strategi geopolitik, geostrategis dan geoekonomi yang berbeda. China punya rencana strategis jangka panjang

menjaga kestabilan dan keamanan maritime di kawasan. Dari antara negara-negara Eropa ini, Perancis yang paling terganggu dengan pola pikir AS dan AUKUS yang dibentuknya, tetapi Perancis pun menunjukkan sikap lebih kesal pada Australia daripada kepada AS (Raharja 2021).

India pun bereaksi dengan mengatakan bahwa China adalah "*a revisionist power*" yang akan mengancam *status-quo* di kawasan (Panda 2021). Namun demikian, peranan India lebih bersifat simbolik karena perhatian India secara ekonomi di Indo-Pasifik terbatas pada Samudra Hindia dan pada Singapura sebagai mitra ekonominya apalagi India memilih tidak mau berada dalam kerangka kerja sama ekonomi yang dihadiri oleh China seperti *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* (Joshi, 2021).

Yang pasti, dokumen soal Indo-Pasifik yang secara khusus membahas perihal ruang udara dan antariksa justru muncul dari AS. Melalui *United States Indo-Pacific Command (USINDOPACOM)*, AS mengintegrasikan kekuatan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara AS yang bertugas di wilayah Indo-Pasifik dengan komando Angkatan Bersenjata Jepang dan Angkatan Bersenjata Korea Selatan. Tak lain tak bukan, mandate USINDOPACOM adalah melindungi dan mempertahankan wilayah, kepentingan dan warga negara AS.

yang terkelola dengan rapi sementara Rusia memilih jalur oportunis, agresif namun reaktif dan siap membumi-hanguskan lawan. India memilih untuk berhati-hati. Meskipun hadir dalam QUAD Summit bulan September 2021, belum ada komitmen lebih lanjut soal kerja sama terpadu bidang militer dari India untuk menghadapi China. AUKUS belum ada publikasi kegiatan lebih lanjut.

Secara teknis, karena kekuatan militer Indonesia belum secanggih negara-negara

yang berlomba senjata dan pengaruh, maka kedalaman informasi soal ancaman dan pergeseran rasa percaya dari negara-negara lain tersebut akan sulit dibaca dengan tepat oleh Indonesia. Hal ini cukup beresiko, terutama jika mengamati percepatan eskalasi ancaman yang tidak surut meskipun ada pandemi. *Timing* menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Urusannya tidak bisa lagi *business as usual*.

Suka ataupun tidak, wilayah perairan, udara dan antariksa di Indonesia sudah menjadi medan pertarungan kekuatan dari negara-negara lain. Belum ada indikasi bahwa Indonesia mampu menghentikan bahkan mendeteksi keseluruhan perlombaan senjata tersebut. Padahal tanda-tanda hadirnya *proxy war* di kawasan sudah muncul seperti di Myanmar. Negara-negara anggota ASEAN punya interpretasi yang berbeda-beda pula tentang cara berhadapan dengan AS dan China. Forum-forum ASEAN secara tidak langsung menciptakan lapisan-lapisan negosiasi akibat ketidakpastian *timing* kolektif untuk bereaksi atas peningkatan ketegangan AS dan China. Negara-negara Uni Eropa memang mengatakan akan mendorong agenda multilateralisme Indo-Pasifiknya lewat ASEAN tetapi mereka relatif masih awam dalam menavigasi dialog pertahanan keamanan di ASEAN. Justru Inggris yang sejak keluar dari Uni Eropa aktif mengikat dirinya makin dekat ke ASEAN, mengucurkan dana untuk berbagai kegiatan ASEAN dan relatif tidak kikuk berhadapan dengan ASEAN dalam isu apapun.

Jika menilik konsep pertahanan Indonesia yang menyoroti fungsi pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter, maka secara filosofis maupun teknis terdapat pengkotakan pola pikir tentang penanganan pertahanan dan keamanan. Rencana Strategis Kementerian Pertahanan 2020-2024 terfokus pada pembangunan pertahanan yang mendambakan perwujudan *Minimum Essential Force*. Keterlibatan sipil terbatas pada partisipasi sebagai Kader Bela Negara,

bukan di level strategis seperti di AS dan China. Pembelian alutsista masih terbatas pada pertimbangan politik anggaran dan politik luar negeri berbasis ide modernisasi, penambahan, diversifikasi jenis dan teknologi peralatan, belum pada pertimbangan strategis seperti *interoperability* dan antisipasi atas operasi radar penangkal atau teknologi siber yang merusak sistem pertahanan Indonesia. Walaupun isu siber sudah diangkat, belum nampak ada reaksi yang setimpal dengan perkembangan isu siber di kawasan. Dengan kata lain, konsep pertahanan Indonesia masih relatif statis; belum selaras dengan cara negara-negara lain memandang geopolitik yang tidak dipisahkan dari geostrategi dan geoekonomi.

Lebih mendasar lagi, bahkan, diplomasi Indonesia di bidang non-militer maupun militer masih cenderung mengikuti arah angin bertiup dan bukannya menciptakan aliran angin yang berbeda di kawasan. Indonesia mengandalkan ASEAN sebagai forum pendesak negara-negara yang saling hilang rasa percaya, padahal negara-negara ASEAN belum punya mekanisme militer maupun non-militer untuk melunturkan ambisi AS, China, Rusia yang tidak malu-malu menjadikan Indo-Pasifik dan Asia Tenggara sebagai medan pertarungan senjata dan pengaruh.

AS, China, Rusia tidak menunjukkan rasa diatur oleh regionalisme macam ASEAN. Indonesia telah menawarkan narasi tandingan dari konsep-konsep Indo-Pasifik yang diangkat oleh QUAD, menawarkan skema tata kelola jalur perlintasan laut bagi China, tetapi pandangan negara-negara ini belum terbukti dapat dibentuk oleh Indonesia ataupun ASEAN. Di tataran bilateral, diplomasi Indonesia juga belum mumpuni untuk mengawal ASEAN pada isu-isu geostrategis dan geopolitik. Sampai hari ini memang ada dialog soal pertahanan keamanan, tetapi partisipasi AS, China, Rusia di forum-forum ASEAN belum terlihat menyurutkan ambisi mereka untuk saling menyerang. Pada saat

pandemi, perhatian Indonesia cenderung semata terarah pada agenda-agenda ekonomi dan kesehatan. Apakah masih sulit bagi Indonesia untuk membagi perhatian sekaligus pada sejumlah isu strategis yang bersifat time sensitive? Ini pertanyaan refleksi yang membutuhkan jawaban segera dan jitu.

Jelas masih ada kesenjangan antara yang dilakukan Indonesia dengan aksi-reaksi

Kesimpulan

Perkembangan geopolitik terkini mengingatkan kita bahwa kita perlu melihat lebih luas dari sekadar penguatan peran negara atas suatu wilayah kedaulatan. Dokumentasi yang ada menunjukkan bahwa ada interaksi antar negara yang saling mengamati, saling mengejar dan bersaing. Konsep regionalisme macam ASEAN sejauh ini belum terbukti mampu mendesak AS, China, Rusia untuk berpikir berbeda. Memang terjadi pernyataan bersama dalam berbagai forum yang melibatkan kepala negara dari AS, China, Rusia dengan ASEAN, tetapi belum terbukti bahwa pernyataan-pernyataan bersama tersebut dapat menghentikan ambisi AS, China dan Rusia untuk saling menyerang. Dinamika konsep kewilayahan antar negara yang berkembang belum dapat membentuk dinamika relasi antar negara di Indo-Pasifik.

Patut dicermati bahwa perlombaan senjata sedang terjadi di kawasan, termasuk di wilayah perairan, udara dan antariksa Indonesia. Konsep pertahanan keamanan dan persenjataan Indonesia belum mampu menghentikan bahkan mendeteksi keseluruhan perlombaan senjata tersebut. Skema diplomasi Indo-Pasifik justru mengintensifkan persaingan narasi dan tidak melunturkan niat untuk saling menyerang. Skema meneka persaingan tersebut lewat ASEAN belum efektif terutama karena di tataran perlombaan persenjataan, regulasi dan tata kelola persenjataan yang adadi ASEAN belum mampu menghentikan

antar negara yang sedang membentuk cara pandang satu sama lain di kawasan. Negara-negara yang saling kompetitif terus membingkis kegiatannya untuk saling bersaing dan mengancam dalam narasi-narasi diplomatik seputar “stabilitas kawasan,” “perdamaian”, dan “kerja sama”, padahal esensinya jelas tidak selaras dengan kepentingan Indonesia.

perlombaan tersebut.

Ada dua rekomendasi yang diusulkan berdasarkan penelitian ini.

Pertama, di dalam negeri Indonesia perlu memper timbangkan revisi pada Rencana Strategis Kementerian Pertahanan agar sesuai dengan perkembangan geopolitik, geostrategis dan geoekonomi kawasan. Urusan pembelian alutsista, perencanaan dan manajemen pertahanan perlu secepatnya diubah agar sinergis dengan isu dan pemikiran aktor-aktor non-militer mengingat bahwa strategi perang negara-negara lain justru makin jitu dan cepat dengan tidak meninggalkan keterlibatan sipil di level-level strategis.

Kedua, di tataran diplomasi, Indonesia perlu merumuskan bersama negara-negara ASEAN dan non-ASEAN seperti Uni Eropa dan negara-negara Indo-Pasifik lainnya suatu praktek bersama demi menghambat ambisi perlombaan senjata di kawasan. Teknologi boleh saja ditingkatkan demi kemajuan martabat manusia, dan bukannya untuk merusak dan menjadikan negara-negara lain sebagai medan *proxy war*. (***)

Daftar Pustaka

- Allen, Susan H. & Machain, Carla M. (2018). Choosing air strikes. *Journal of Global Security Studies* 3 (2): 150-162.
- ASEAN a. (2021). Joint Statement of the ASEAN-China Special Summit to commemorate the 30th anniversary of ASEAN-China Dialogue Relations. <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/11/Joint-Statement-30th-Anniversary-of-ASEAN-China-Dialogue-Relations-Final.pdf>
- ASEAN b. (2021). Chairman's Statement of the 9th ASEAN-United States Summit, 26 October. <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/10/85.-Final-Chairmans-Statement-9th-ASEAN-US-Summit-As-of-27-Oct-2021.pdf>
- ASEAN c. (2021). Joint Statement of the 4th ASEAN-Russia Summit: Building a peaceful, stable and sustainable region. <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/11/82.-Joint-Statement-of-the-4th-ASEAN-Russia-Summit-Final.pdf>
- Costello, J. & McReynolds J. (2018). China's Strategic Support Force: A Force for a New Era. *Center for the Study of Chinese Military Affairs, China Strategic Perspectives* no. 13. Washington DC: National Defense University Press.
- Department of Defense, US. (2019). *Indo-Pacific Strategy Report: Preparedness, partnerships and promoting a networked region*. <https://media.defense.gov/2019/Jul/01/2002152311/-1/-1/1/DEPARTMENT-OF-DEFENSE-INDO-PACIFIC-STRATEGY-REPORT-2019.PDF>
- Department of Defense, US. (2020). Military and security developments involving the People's Republic of China. *Annual Report to Congress from the Office of the Secretary of Defense*.
- Dijkink, G. (1996). *National Identity and Geopolitical Visions*. London: Routledge.
- ESPAS. (2018). The Future of Warfare. *ESPAS Ideas Paper Series*.
- Global Times. (2021). Chinese developed anti-stealth radar is superior to its foreign counterparts: top radar scientist. 24 April.
- Goguichvili, S., Linenberger, A. & Gillette, A. (2021). The Global legal landscape of space: who writes the rules on the final frontier. *Wilsoncenter.org*. 1 October. <https://www.wilsoncenter.org/article/global-legal-landscape-space-who-writes-rules-final-frontier>
- Grissom, Adam R. et.al. (2022). Russia's Growing Presence in Africa: A Geostrategic Assessment. *RAND Research Report*.
- Haruko, Wada. (2020). The Indo-Pacific Concept: Geographical adjustments and their implications. *RSIS Working Paper* No. 326, 16 Maret.
- Hunter, Peter. (2020). Diversifying air power: broadening Air Force's value proposition in an age of high contest. *National security College Occasional Paper*, Australian National University. May.
- Joshi, Manoj. (2021). What's in a name? India's role in the Indo-Pacific. *Observer Research Foundation*, 22 Juli.
- Kuus, Merje. (2010). Critical geopolitics. *Oxford Research Encyclopedias*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.137>
- Larson, Eric V. (2004). Interoperability of US and NATO Allied Air Forces: Supporting Data and Case Studies. *RAND Project Air Force, Research Brief*.
- Ministry of Foreign Affairs Japan. (2018). Special feature: to achieve a "Free and Open Indo-Pacific". <https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2019/html/chapter1/c0102.html#sf01>